BAB III

IMPLEMENTASI KERJASAMA SISTER CITY PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN PERFEKTUR KYOTO

Dalam era globalisasi ekonomi, setiap Propinsi sebagai pelaku ekonomi di tuntut dalam memiliki keunggulan baik itu keunggulan kompetitif maupun keuntungan komperatif yang membuatnya dapat untuk survive dan juga selanjutnya sukses dalam meraih peluang dalam tingkat persaingan yang sangat ketat. Untuk meraih peluang globalisasi di atas, maka kerjasama internasional antar pelaku ekonimo menjadi sangat penting dalam membentuk hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka mengoptimalkan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang bekerjasama.

Propinsi DIY dalam perspektif ekonomi global telah menjalin kerjasama internasional baik yang berupa sister province maupun berupa kerjasama internasional dengan lembaga-lembaga non pemerintah. Dari perspektif pelaku dan prosesnya, setiap pembentukan kerjasama baik berupa sister province, kerjasama dengan Lembaga Pemerintah maupun dengan Lembaga non pemerintah (privat) memiliki keunikannya masing-masing. Informasi tentang pelaku dan proses pembentukan setiap kerjasama tersebut menjadi sangat penting dalam rangka pengembangan kerjasama baru maupun upaya peningkatan kualitas kerjasama yan telah ada.

A. Proses dan Terjalinnya Kerja sama Sister City Provinsi DIY dengan Perfektur Kyoto

Konsep kerja sama antarkota di satu negara dengan kota di negara lain yang biasa diistilahkan sister city pada mulanya merupakan sebuah konsep hubungan kemitraan yang dikembangkan di

Amerika Serikat (AS) pada tahun 1960-an sejalan dengan ide Presiden Eisenhower untuk meningkatkan diplomasi di antara masyarakat atau istilahnya; people to people diplomacy, yang di cetuskan pada tahun 1956.[1] Pada wakti itu tujuan dari kerja sama antarkota ini adalah untuk menjembatani hubungan antara masyarakat kota di satu negara dengan negara lain, kemudian berkembang tidak hanya antarkota tetapi juga antar provinsi atau negara bagian di dunia.

Pada mulanya kerja sama sister city/province berkembang dan biasa dilakukan oleh antarkota di negara maju di Eropa Barat, namun kemudian berkembang di kota-kota dan negara bagian di Amerika, dan selanjutnya menyebar ke seluruh dunia termasuk di kawasan Asia.[2]

Dewasa ini, kerja sama sister city/province tidak hanya dilakukan di negara maju saja, tetapi bisa juga dilakukan antara negara maju dengan negara berkembang atau bahkan di antara negara berkembang, seperti contohnya kota dan provinsi di Indonesia dengan kota dan provinsi di negara lain. Kerja sama itu sebenarnya dapat menjadi saran untuk meningkatkan dan membangun potensi yang ada, serta juga dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan kota atau provinsi masing-masing melalui tukar menukar pengalaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan kota maupun provinsi di negara lain.[3]

Setelah otonomi daerah diterapkan di Indonesia, geliat pemerintah daerah baik kota maupun provinsi untuk melakukan kerja sama sister city/province dengan negara lain semakin terlihat pesat. Pemerintah daerah tentu saja dapat melakukan kerja sama sister city/province dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1) dan (2), Pasal 13

[1] Agustinus Supriyanto & Andi Sandi A.T.T., Pengembangan Potensi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kerja sama Sister Province, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011, hlm. 15

[2] Andi Oetomo,Pengolaan Perkotaan Lewat Skema Sister City, op.cit., hlm.3

[3] Agustinus Supriyanto & Andi Sandi A.T.T., loc.cit.

dan 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,[4] kemudian pasal 42 Ayat (1) huruf (g)[5] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20018 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah perlu terlebih dahulu melakukan konsultasi dan kordinasi dengan pemerintah pusat seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1)[6] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Barulah kemudian pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama itu setelah mendapatkan full powers (surat kuasa) seperti yang termaktub dalam Pasal 7 Ayat (1)[7] Undang-Undang Perjanjian Internasional. Otoritas yang dimiliki oleh pemda untuk melakukan kerja sama itu muncul karena adanya full powers (surat kuasa), jadi bukan karena keinginananya pemda sendiri.

Adanya keterlibatan pemerintah pusat dalam pemberian full powers ini bertujuan agar perjanjian yang dibuat pemda tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Menurut penulis, pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama ini sebenarnya bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia.

Untuk kerja sama atas prakarsa pihak luar/asing, mekanisme yang berlaku adalah :[8]

a. Setelah melalui pertimbangan politis dan yuridis, Deplu secara resmi menyampaikan tawaran program kerjasama dari perwakilan RI di luar negeri dan atau pihak asing kepada Pemda atau instansi terkait.

[4] Isi lengkap Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
[5] Isi lengkap Pasal 42 Ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
[6] Isi lengkap Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
[7] Isi lengkap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
[8] Takdir Ali Mukti, Paradiplomacy kerja sama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia, op.cit., hlm.188

b. Pemda secara resmi menyampaikan tanggapan terhadap tawaran program kerjasama tersebut, termasuk usulan program.
c. Usulan program kerjasama dibahas dalam rapat inter-departemen yang dikoordinasi oleh Deplu atau instansi yang terkait langsung dengan substansi dan materi kerjasama dengan melibatkan daerah.
d. Deplu menyampaikan hasil rapat interdepartemen kepada perwakilan RI di luar negeri dan berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik dan konsuler pihak asing di Indonesia.
e. Deplu memberitahukan hasil koordinasi kerjasama ini kepada instansi terkait di daerah.
f. Kesepakatan kerjasama antara pihak asing dan daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional yang lazim digunakan.

Fokus kerjasama yang dijalin Yogyakarta dengan *partner* sister city dan sister province meliputi bidang :[9]

1. Administrasi
2. Ekonomi, Investasi & Perdagangan
3. Industri
4. Kehutanan
5. Kerajinan
6. Lingkungan hidup
7. Pariwisata
8. Pembangunan Infrastruktur
9. Pendidikan dan IPTEK

[9] Ibid

10. Pengembangan SDM
11. Perhubungan
12. Pertanian
13. Seni dan Budaya

Berdasarkan bidang kerjasama tersebut, Pemerintah Propinsi DIY berkoordinasi dengan departemen-departemen pemerintah, institusi maupun pihak-pihak swasta yang terkait, seperti:[10]

1. BAPPEDA
2. BATAN
3. Biro Tata Pemerintahan
4. Dinas Kebudayaan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Pertanian
8. Dinas Perhubungan
9. Pemda Kabupaten
10. Perguruan Tinggi (UGM, UII, UMY dll)

Sampai saat ini ada lebih dari 8 pemerintah provinsi dan 47 pemerintah kota dari 33 provinsi di Indonesian yang telah melakukan kerja sama sister city/province.[11] Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk salah satu daerah yang aktif dalam menjalin kerja sama sister

[10] Ibid
[11] List of twin towns and sister cities in Indonesia. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_twin_towns_and_sister_cities_in_Indonesia. Diakses tanggal 7 agustus 2017.

province dengan provinsi di negara lain. Beberapa kerja sama bahkan telah dirintis jauh sebelum era otonomi daerah, seperti sister province DIY dengan Kyoto pada tahun 1985. Hal itu dikarenakan adanya kedekatan antara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Gubernur Kyoto, Jepang, yang dahulu pernah melakukan tugas militer di Yogyakarta.[12] Kerja sama sister province DIY dengan Kyoto merupakan yang paling tua dan produktif, karena adanya ikatan sejarah. Sebagai sebuah warisan dari Sultan Hamengkubuwono IX kepada Sultan Hamengkubuwono X, maka kerja sama ini diupayakan tetap bisa dilanjutkan hingga dimasa mendatang.[13]

Perfektur Kyoto merupakan suatu daerah di jepang, hubungan antara Kyoto dan DIY dapat dibilang istimewa bila dibanding dengan hubungan DIY dengan daerah – daerah lainya. Hubungan antar kedua wilayah ini sudah terjalin sejak Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Gubernur Perfektur Kyoto pada saat itu yang bernama Yukio Hayashida. Pada masa perang dunia II Yukio Hayashida pernah bertugas di DIY, sehingga sudah memahami Yogyakarta sejak lama. Faktor historis sangat mempengaruhi hubungan baik kedua wilayah ini.

Menurut Pemerintah DIY hubungan kerjasama antara kedua pihak mempunyai latar belakang sebagai berikut:[14]

a. Keinginan Gubernur Perfektur Kyoto Yukio Hayashida yang banyak mengetahui seluk beluk Provinsi DIY sewaktu bertugas di Yogyakarta pada saat terjadinya Perang Dunia II.

[12] Takdir Ali Mukti, Paradiplomacy kerja sama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia, op.cit., hlm.243
[13] Ibid
[14] Ibid

b. Hubungan baik antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan Gubernur Perfektur Kyoto Yukio Hayashida.
c. Adanya kesamaan antara Provinsi DIY dan Perfektur Kyoto antara lain keduanya merupakan bekas ibukota negara dan kedua kota tersebut mempunyai nilai-nilai perjuangan.
d. Provinsi DIY dan Perfektur Kyoto merupakan daerah budaya dan daerah tujuan wisata nasional maupun internasional.
e. Keindahan alam kedua provinsi dapat diandalkan bagi pengembangan pariwisata dan pusat pendidikan.

Apabila ditinjau dari latar belakang terbentuknya kerjasama antara Provinsi DIY dan Perfektur Kyoto, kedua wilayah ini memang mempunyai banyak kesamaan diberbagai bidang, seperti latar belakang kedua wilayah ini sebagai bekas ibukota di masing-masing negara, keindahan alam dan kondisi budaya. Apabila Kyoto terkenal dengan kerajinan tenun tradisional *Nishijin*, yang menjadi *backbone* industri tekstil modern, Yogyakarta memiliki seni kerajinan batik yang diakui sebagai *World Culture Heritage* oleh PBB, yang pengembangannya di Indonesia menjadi tren mode fashion masa kini.

Berbagai kesamaan antara kedua wilayah ini yang kemudian menjadikan keduanya kembali melakukan persetujuan yakni dalam *Reaffirmation of The Sister Agreement Between Yogyakarta Special Region, Republic of Indonesia and Kyoto Perfecture, Japan*. Berdasarkan hasil dari Pertemuan Komite Kerjasama di Yogyakarta kedua belah pihak menyepakati hal-hal berikut:[15]

[15] Antara Kyoto, Yogyakarta, dan Pendidikan (http://www.pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=v_berita&id_sub=2520) diakses 02 september 2017

a. Penyesuaian naskah Perjanjian Kerja sama (MoU) sesuai dengan tata naskah dan ketentuan yang berlaku, terutama mengenai jangka waktu dan bidang-bidang dalam lingkup kerjasama.
b. Melakukan kerjasama dibidang seni dan budaya, pendidikan dan iptek, pariwisata dalam arti luas, industri dan bidang-bidang lainya.

Hubungan antara Provinsi DIY dengan Prefektur Kyoto, Jepang dapat dianggap sebagai hubungan yang bersifat istemewa, disebabkan oleh faktor historis yang melatarbelakanginya. Kerja sama sister province antara Provinsi DIY dan Kyoto, Jepang, secara resmi terjalin dalam Agreement for The Esrablishment of Friendly Relations atau Persetujuan untuk Pembentukan Hubungan Kerja Sama Persahabatan yang di tandatangani oleh Sri Paku Alaman VIII sebagai wakil Guberur dan Yukio Hayasida sebagai Guberrnur Perrfektur Kyoto, Jepang pada taggal 16 Juli 1985 di Kyoto. Masa kerja sama ini tidak diatur, karena Prefektur Kyoto menganggap kerja sama persahabatan itu sifatnyab kekal atau selamanya.[16]

B. Bidang-bidang yang Dikerjasamakan dalam Sister City Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Perfektur Kyoto

Kedua belah pihak menetapkan garis besar Program kerja sama yang telah disepakati agar supaya mendapati kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dikehendaki bersama :[17]

1. Kesenian dan Kebudayaan
    a. Pertunjukan dan Pamern kesenian dan kebudayaan
    b. Informasi tentang kesenian tradisional dan budaya

[16] Hubungan dan kerja sama sister province ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, adanya hubungan pribadi anatara Hamengkubuwono IX dengan Gubernur Kyoto
[17] http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/2807_JPN-1985-0485.pdf

c. Tehnik pelestarian warisan kebudayaan dan pelestarian lingkungan di seputar wilayah

d. Pengembangan kesenian dan kebudayaan

2. Pendidikan dan Tehnologi Ilmu Pengetahuan

a. Skema pengembangan pendidikan

b. Pelajaran informasi khusus dan tehnik

c. Kegiatan pendidikan sekolah

d. Pengembangan tehnologi

3. Peningkatan Pariwisata

a. Informasi priwisata

b. Pengelolaan kekayaan pariwisata dan pengembangan objek wisata

c. Rencana pengembangan pariwisata

d. Peningkatan dan pameran pariwisata

4. Industri

a. Pengelolaan dan tehnik kerajnan dan industri rumah tangga

b. Pelestarian dan peningkatan industri tradisional

c. Pameran produk di kedua belah pihak

d. Pengembangan industri lokal

5. Lain-lain

a. Saing kunjung mengunjungi dari kedua delegasi

b. Saling kunjung mengunjungi wanita dan pemuda

c. Pertandingan olahraga

d. Bidang-bidang lain

C. Kegiatan Program Kerjasama Sister City Provinsi DIY dengan Perfektur Kyoto yang Telah Terlaksana

DIY telah menjalin kerjasama *Sister City* selama 30 tahun lebih dengan Kyoto. Terdapat beberapa program yang diselenggarakan DIY dengan Kyoto dalam kerjasama Sister City ini. Mulai pada tahun 1985 hingga sekarang ada beberapa program yang telah. Telah banyak peristiwa dalam program terencana yang terjadi dalam 30 tahun dekade kerjasama Sister City DIY dengan Kyoto. Untuk melihat perkembangan atau implementasi Sister City kedua kota, maka akan diceritakan alur panjang kerjasama Sister City dari awal tahun perjanjian hingga tahun 2015.

1. Tahun 1985

Belum ada program yang dilakukan. Pada tahun ini baru menyusun rencana program yang akan dilaksanakan. Pada tahun ini pertama kali dilakukannya penandatangann MoU dibuat dalam rangkap dua dalam Bahasa Jepang, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Penandatangan MOU memorandum of understanding pada tanggal 16 juli[18].

2. Tahun 1994 - 2004

a. Terbentuknya League of Historical Cities atau Liga Kota-Kota Bersejarah (LHC) yang berpusat di Kyoto, Jepang dan Yogyakarta adalah salah satu anggota pendirinya.
b. Pengiriman misi kesenian di Kyoto.

[18] Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi DIY, laporan monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri tahun 2009 hal 8.

c. Doa bersama untuk perdamaian dunia. Kegiatan doa bersama tersebut telah menarik minat rombongan utusan dari Internasional Zen Exchange Friendship (IZETA) Kyoto, Jepang, diikuti oleh lebih kurang 189 orang pemuka agama Provinsi DIY dan Kyoto pada tahun 2002.[19]

d. Pengiriman petugas untuk belajar teknik konservasi pelestarian lingkungan cagar budaya. Para personil yang telah dilatih di Jepang dalam bidang konservasi cagar budaya telah dapat membantu melaksanakan renovasi beberapa cagar budaya di Yogyakarta.

e. Menerima expert atau tenaga ahli di bidang pariwisata (awal tahun 2003), dua orang memberi pelatihan marketing

3. Tahun 2005

a. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa (khususnya Sastra Jepang, ada 21 orang tiap tahunnya) Yogyakarta, dan pemberian beasiswa untuk belajar ke Jepang.

b. Kunjungan gubernur DIY ke Kyoto menghadiri pameran batik, fashion show kolaborasi kimono-batik batik-kimono serta pentas kesenian lainnya. Pada tanggal 9-14 November 2005 di Kyoto, Jepang, bersamaan dengan kunjungan Gubernur DIY beserta delegasi instansi teknis terkait, dilaksanakan beberapa kegiatan, yakni: pameran Batik Kraton; pertunjukkan kolaborasi fashion show Batik Yogyakarta dan tekstil Jepang serta Kimono Batik Kyoto; penyerahan dan pementasan Gamelan serta pentas kesenian Mitologi; promosi dan meeting bersama antara pemerintah dengan pelaku pariwisata dari kedua provinsi; pertemuan dengan Asosiasi Persahabatan

[19] Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2002, Bahan Acara Nomor 36 Tahun 2003, Sekertariat DPRD Provinsi DIY, hlm.230

Indonesia-Jepang; dan kunjungan ke Miyagawa Town, sebuah konsep pariwisata yang melestarikan kota tua dan bangunan bersejarah tanpa meninggalkan bidang pertanian dan penghijauan lingkungan.[20]

4. Tahun 2006
   a. Bidang Mengadakan pameran dan promosi hasil kerajinan yang diikuti 20 perusahaan industri kerajinan, pameran misi dagang dan industri, pengiriman promosi wisata, bantuan gempa bumi pada 27 Mei tahun 2006 (Kyoto adalah pemerintah asing yang pertama kali memberi bantuan).
   b. Penanganan pelestarian lingkungan cagar budaya
5. Tahun 2007
   a. Program Te Collabo pada tahun 2007 yang fokus pada pengembangan UKM pasca-gempa di Yogyakarta. Industri kecil dan menengah yang terpilih adalah pengrajin batik Imogiri, pengrajin batik kayu lurik Krapyak, dan pengrajin tenun serat alam Gamplong yang mayoritas adalah korban bencana gempa bumu pada 27 Mei tahun 2006.[21]
   b. Penanganan plestarian lingkungan cagar budaya di kawasan Tamansari, Kota Gede, Situs Gamping, dan Candi Ratu Boko.[22]

[20] Takdir Ali Mukti, Paradiplomacy kerja sama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia,op.sit., hlm.252-254.
[21] Nur Syahrir Raharjo, pada Workshop Pengembangan kerja sama DIY-Kyoto Prefecture, dikutip dari Takdir Ali Mukti, Paradiplomacy kerja sama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia, op.cit., hlm.230.
[22] Pada Tahun 2008 didatangkan expert (tenaga ahli) dari Kyoto ke Yogyakarta yakni Mr. Hiroki Okumo dan Mr. Yasuhiro Yamaguchi untuk membantu restorasi cagar budaya di Provinsi DIY yang rusak karena bencana gempa bumi. Laporan Monitoring Evaluasi kerja sama Luar Negeri Tahun 2008, loc.cit.

6. Tahun 2008

Gubernur DIY dan staff melakukan promosi wisata yang melibatkan Garuda Indonesia, menandatangani perjanjian kerjasama pengiriman tenaga perawat khusus untuk lansia serta mempelajari manajemen bencana di Kyoto.

7. Tahun 2010

Pada tahun ini merupakan peringatan 25 tahun kerja sama dengan pengguntingan buntal di gerbang torii gate di jalan malioboro serta penandatanganan Reaffirmation of The Sister State Agreement antara Gubernur DIY dan Gbernur Kyoto. Pada perkembangan berikutnya, yakni pada tanggal 20 Oktober 2010 kedua belah pihak mengadakan "Persetujuan Penegakan Kembali Kerja Sama anata Kedua Provinsi", dan dari menghasilkan kesepakatan untuk melakukan penyesuaian naskah "Perjanjian Kerja Sama Sister Province (MoU)" sesuai dengan tata naskah dan ketentuan yang berlaku terutama mengenai jangka waktu dan bidang-bidang dalam lingkup kerja sama. Juga melakukan kerja sama d bidang seni dan budaya, pendidikan, IPTEK, pariwisata, industri, dan bidang lainnya.[23]

8. Tahun 2011

Pada tahun ini adanya Fasilitasi persetujuan kerja sama antara Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan Universitas Ritsumeikan, Kyoto, Jepang, pada tahun 2011.[24] Kerja sama dengan

[23] Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun 2010, Sekertariat DPRD DIY, 2011.
[24] Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun 2011, Sekertariat DPRD DIY, 2012, hlm.VI-4.

Prefektur Kyoto kemudian terus berlanjut dengan ditandatangani kesepakatan kerja sama antara Universitas Muhammadiyah (UMY) dan Universitas Islam Indonesia (UII) dengan Universitas Ritsumeikan di Kampus Suzaku Universitas Ritsumeikan, Kyoto, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011. Sebagai universitas di luar negeri, Universitas Ritsumeikan merupakan salah satu universitas ternama di Jepang yang banyak membuka peluang kerja sama secara internasional, termasuk dengan Indonesia. Sampai saat ini tercatat ada 46 mahasiswa Indonesia, yaitu 6 mahasiswa program sarjana, 39 mahasiswa program pascasarjana dan satu mahasiswa program non-gelar yang telah menempuh pendidikan di Universitas Ritsumeikan.

9. Tahun 2015

Pada tahun ini merupakan penegasan atau perpanjangan kembali kerjasama kota kembar antara DIY dengan Kyoto, mempromosikan peluang investasi dan kerjasama ekonomi dan mendapatkan penjelasan terkait upaya yang dilakukan Kyoto dalam mengembangkan produk pertanian, peternakan,perikanan, dan kehutanan.

10. 2000 – 2017

Melaksanakan lomba lukis di DIY dan KYOTO untuk tingkat Sekolah Dasar sampai SMA dan 30 Nominasi yang terbaik lukisannya dipamerkan di DIY dan Kyoto. Dengan tujuan mempromosikan karya budaya dari masing-masing daerah melalui media lukisan yang dihasilkan melalui proses lomba.